

9-30-2000

PERAN PERBANKAN SULAWESI TENGGARA DENGAN DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH

Timbul Budi Santoso

Dedi Noor Cahyanto

Kamaruddin Nur

Leo R. Tandiarrang

Follow this and additional works at: <https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb>

Recommended Citation

Santoso, Timbul Budi; Cahyanto, Dedi Noor; Nur, Kamaruddin; and Tandiarrang, Leo R. (2000) "PERAN PERBANKAN SULAWESI TENGGARA DENGAN DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH," *Bulletin of Monetary Economics and Banking*: Vol. 3: No. 2, Article 2.

DOI: <https://doi.org/10.21098/bemp.v3i2.295>

Available at: <https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol3/iss2/2>

This Article is brought to you for free and open access by Bulletin of Monetary Economics and Banking. It has been accepted for inclusion in Bulletin of Monetary Economics and Banking by an authorized editor of Bulletin of Monetary Economics and Banking. For more information, please contact bmebjournal@gmail.com.

PERAN PERBANKAN SULAWESI TENGGARA DENGAN DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH

*Timbul Budi Santoso, Dedi Noor Cahyanto,
Kamaruddin Nur dan Leo R. Tandiarrang^{*)}*

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18 UUD 1945, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan undang-undang.

Dengan demikian, UUD 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung-jawab kepada daerah yang kemudian dituangkan dalam Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, pada hakekatnya pemerintahan suatu negara mengemban tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi, yang meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa layanan masyarakat; fungsi distribusi yang mencakup pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan; dan fungsi stabilitas yang mencakup pertahanan-keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah pusat sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan Pemerintah Daerah karena daerah lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda di masing-masing wilayah, dengan demikian pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam pembentukan UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 masing-masing tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Hubungan Keuangan Antara Pusat

^{*)} Peneliti Kantor Bank Indonesia Kendari

dan Daerah mengganti UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah.

Implentasi secara menyeluruh atas UU di atas dirasakan masih membutuhkan waktu mengingat proses penyusunan aturan pendukung yang sampai sekarang masih berjalan, di sisi lain upaya sosialisasi keberadaan kedua UU tersebut juga terus diupayakan sehingga nantinya akan tercapai kesamaan persepsi yang sangat bermanfaat bagi percepatan pembangunan daerah sebagaimana yang diinginkan.

Sektor perbankan yang memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai *lembaga intermediasi*, *alat transmisi kebijakan moneter* dan *penyelenggara sistem pembayaran* harus senantiasa menyiapkan diri guna mengantisipasi pemberlakuan UU dimaksud. Pergeseran fungsi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta alokasi dana pembangunan yang selama ini didominasi pemerintah pusat dan pemerintah propinsi kepada pemerintah kabupaten/kota akan berdampak terhadap gerak langkah pembangunan. Sikap antisipatif perbankan mutlak dibutuhkan selain dalam peranannya sebagai sektor penunjang pembangunan juga dalam menjaga kestabilan moneter masing-masing daerah kabupaten/kota.

Perkiraan semakin menguatnya tekanan fiskal di daerah sebagai dampak pemberlakuan UU tersebut harus diantisipasi oleh perbankan sebagai dinamisor pembangunan melalui tiga fungsi yang disebutkan di atas. Di sisi lain Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tidak bisa serta merta mempengaruhi secara langsung perkembangan ekonomi daerah melalui kebijakan moneternya. Hal ini disebabkan kebijakan moneter yang bersifat *uniform* berlaku semua untuk daerah, oleh karenanya tidak ada kebijakan moneter yang diperuntukkan bagi daerah tertentu saja.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh sekaligus peluang perbankan Sulawesi Tenggara sehubungan diberlakukannya UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan Perimbangan Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah.

3. Pembatasan Masalah

Untuk lebih memusatkan arah dan tujuan penulisan penelitian dimaksud, maka perlu dilakukan pembatasan-pembatasan masalah sbb :

- a. Penyusunan perkiraan besar pendapatan dan pengeluaran pembangunan pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota paska pemberlakuan UU No.22 dan No.25 Tahun 1999 berdasarkan *forecast* model pengeluaran pembangunan dan *trend* pengeluaran rutin.

- b. Kajian peran perbankan dibatasi pada pengaruh pengeluaran pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Tenggara terhadap posisi penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit perbankan.

4. Jenis Data Sumber Data

4.1. Data Primer

Diperoleh melalui penyampaian kuesioner kepada responden dengan metode wawancara. Adapun data dimaksud diperoleh dari beberapa sumber :

- Bank Pelaksana yang beroperasi di Propinsi Sulawesi Tenggara terbatas Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang terkait dengan pembagian wilayah operasi berdasarkan masing-masing kabupaten/kota yaitu :

Tabel 1. Responden Bank Pelaksana

Nama Bank Responden	Kodya Kendari	Kab. Kendari	Kab. Kolaka	Kab. Muna	Kab. Buton	Prop. Sultra
PT. Bank Mandiri	2	-	1	-	-	3
PT. BNI	1	-	1	1	1	4
PT. BRI	1	-	1	1	1	4
BPD Sulawesi Tenggara	1	1	1	1	1	5
PT. BCA	1	-	-	-	-	1
PT. BII	1	-	-	-	-	1
PT. BDI	1	-	1	1	1	4
PT. BTN	1	-	-	-	-	1
J u m l a h	9	1	5	4	4	23

- Hasil kuisisioner yang dibagikan kepada 200 responden yang berasal dari berbagai sektor ekonomi di Propinsi Sulawesi Tenggara dengan jenis dan jumlah responden sebagai berikut :

Tabel 1. Responden Penelitian Non Bank

No.	Nama Bank Responden	Kota Kendari	Kab. Kendari	Kab. Kolaka	Kab. Muna	Kab. Buton	Prop. Sultra
1.	Pertanian	7	10	12	7	10	46
2.	Pertambangan & Penggalian	1	1	2	1	2	7
3.	Industri	5	2	2	2	2	13
4.	Listrik & Air Bersih	2	2	2	2	2	10
5.	Konstruksi	6	3	3	3	3	18
6.	Perdag, Hotel & Restoran	10	5	5	5	5	30
7.	Angkutan & Telekomunikasi	8	5	5	5	5	28
8.	Lemb.Keu Non Bank	6	5	5	5	5	26
9.	Jasa-Jasa	6	4	4	4	4	22
	Jumlah	51	37	40	34	38	200

4.2. Data Sekunder

Data perbankan Sulawesi Tenggara yang dilaporkan secara rutin (LBU), indikator makro regional Propinsi Sulawesi Tenggara maupun data lain yang terkait dengan kegiatan pembangunan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota se-Propinsi Sulawesi Tenggara. Adapun sumber data dimaksud berasal dari perbankan, Badan Pusat Statistik Prop. Sulawesi Tenggara, pemerintah propinsi dan kabupaten/kota, Bappeda Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Dispenda Propinsi Sulawesi Tenggara

Disadari bahwa ketersediaan data yang diperlukan tidak sepenuhnya dapat terpenuhi, oleh karenanya dipergunakan data *proxy* melalui penetapan asumsi-asumsi yang dianggap memadai. Adapun keterbatasan data dimaksud antara lain:

- a. Data *time series* seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berlaku, konsumsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah data tahunan yang dibuat bulanan dengan menggunakan model sebagaimana tercantum pada lampiran.
- b. Data konsumsi merupakan data propinsi, untuk mendapatkan data bulanan masing-masing Kabupaten/Kotamadya dilakukan penghitungan menurut tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercermin pada PDRB Berlaku sebagaimana tercantum pada lampiran.

II. Kondisi Ekonomi dan Perbankan di Sulawesi Tenggara

1. Penduduk dan Penyebarannya

Berdasarkan hasil penghitungan BPS melalui SENSUS Nasional tahun 2000 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Propinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 1.771.952 jiwa meliputi 443.874 jiwa (25,05 persen) berada di Kabupaten Kendari, 533.712 jiwa (30,12 persen) di Kabupaten Buton, 321.609 jiwa (18,15 persen) di Kabupaten Kolaka, 273.944 jiwa (15,46 persen) di Kabupaten Muna dan 198.613 jiwa (11,22 persen) di Kotamadya Kendari.

Di antara jumlah penduduk Propinsi Sulawesi Tenggara terdapat $\pm$ 173 ribu jiwa yang merupakan penduduk miskin yang tersebar di seluruh wilayah masing-masing $\pm$ 10 ribu jiwa (5,8 persen) berada di Kotamadya Kendari, $\pm$ 55 ribu jiwa (31,9 persen) berada di Kabupaten Kendari, 17 ribu jiwa (9,9 persen) di Kabupaten Kolaka, $\pm$ 29 ribu jiwa (16,7 persen) di Kabupaten Muna dan $\pm$ 61 ribu jiwa (35,8 persen) berada di Kabupaten Buton.

Berdasarkan data proyeksi Kanwil Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Tenggara, jumlah usia kerja tahun 1999 mencapai 1,3 juta jiwa yang terdiri dari angkatan kerja ± 700 ribu jiwa atau 66 persen dan ± 500 ribu jiwa bukan angkatan kerja. Diperkirakan ± 90 persen dari angkatan kerja dimaksud sudah memiliki pekerjaan sedangkan sisanya berstatus sedang mencari pekerjaan.

2. Kondisi Ekonomi dan Perbankan

Propinsi Sulawesi Tenggara merupakan wilayah yang ekonominya berbasis pada sektor pertanian, hal ini tercermin dari dominasi sektor tersebut pada *share* PDRB tahun 1999 yang mencapai Rp1.954 miliar atau $\pm 41,3$ persen dari total sebesar Rp4.732 miliar. Sektor lain yang juga memberikan *share* besar adalah sektor perdagangan, hotel dan perdagangan sebesar $\pm 15,5$ persen serta sektor jasa-jasa sebesar ± 15 persen.

Pergerakan harga-harga barang di Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana yang tercermin pada laju inflasi selama periode tahun 1989 tercatat 97,77 persen. Secara umum laju inflasi yang terjadi dipengaruhi oleh inflasi kota Surabaya terutama untuk indeks kelompok pakaian, makanan jadi dan transportasi. Hal ini terjadi mengingat Propinsi Sulawesi Tenggara sejauh ini belum memiliki industri selain industri pengolahan pertanian/ perkebunan. Oleh karenanya pemenuhan atas kebutuhan akan produk-produk manufaktur harus di-*supply* dari wilayah lain utamanya Surabaya. Sedangkan pintu masuk akan barang-barang dimaksud selama ini memanfaatkan hubungan laut melalui pelabuhan Bau-Bau di Kabupaten Buton dan pelabuhan Kolaka di Kabupaten Kolaka.

Sampai saat ini jumlah bank yang beroperasi di Propinsi Sulawesi Tenggara berjumlah 8 bank dengan jumlah kantor bank sebanyak 43 meliputi 20 kantor cabang, 6 kantor cabang pembantu, 1 kantor kas dan 16 kantor unit yang menyebar di seluruh wilayah. Berdasarkan data Bank Indonesia per Oktober 2000, total aktiva perbankan Sultra mencapai Rp1.177 miliar dengan posisi penghimpunan dana masyarakat mencapai Rp948 miliar dan posisi penyaluran kredit sebesar Rp355 miliar.

Di Propinsi Sulawesi Tenggara sedang dikembangkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Buton, Kolaka, dan Kendari (KAPET BUKARI). Kawasan ini diarahkan menjadi area pengembangan sentra industri, agrobisnis dan agroforestry serta sebagai kawasan wisata. Diharapkan kawasan tersebut dapat menjadi kawasan penggerak pertumbuhan (*prime mover*) utamanya antar wilayah yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah terbelakang (*spill over effect*) melalui penyediaan infrastruktur yang memadai dan aturan-aturan pendukung (seperti keringanan/kemudahan perizinan, *tax holiday* dan fasilitas pabean) sebagai insentif bagi investor yang berniat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan kawasan tersebut.

3. Pemerintah Daerah Sehubungan Pemberlakuan UU No. 22 dan 25 Tahun 1999

Kebijakan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara pada dasarnya menerapkan strategi pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan yang mencakup aspek mikro dan makro. Strategi pembangunan tersebut disusun sedemikian rupa dengan bermuara pada pengembangan sektor dan komoditi unggulan, peningkatan efisiensi investasi, peningkatan nilai tambah sumber alam, dan fasilitas yang tersedia, serta peningkatan terjadinya efek limpahan dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitarnya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah No.13 Tahun 1999 mengenai Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Propinsi Sulawesi Tenggara.

Keberadaan peraturan daerah dimaksud dipandang sangat strategis untuk memberikan arah pembangunan Propinsi Sulawesi Tenggara dan semakin dimantapkan lagi dengan diberlakukannya Undang Undang Otonomi Daerah. Lebih jauh lagi Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara telah mengambil berbagai langkah-langkah baik terkait dengan penyiapan regulasi (Perda) bersama DPRD mencakup beberapa hal seperti manajemen intern pemerintah daerah, kewenangan pemerintah daerah, dan keuangan daerah. Langkah lain yang ditempuh adalah melakukan kerja sama dengan akademisi dalam melakukan kajian potensi peningkatan pendapatan asli daerah, pembangunan ekonomi secara terpadu dengan seluruh Gubernur di pulau Sulawesi, promosi potensi ekonomi, penguatan struktur ekonomi mikro melalui pembentukan *task force* pembinaan usaha kecil dengan melibatkan perbankan, bappeda, satuan teknis dan pemerintah daerah sendiri. Selain itu dilakukan penyiapan infrastruktur strategis yang mampu mendukung gerak langkah ekonomi Sulawesi Tenggara seperti pemanjangan landasan pacu pesawat di Bandara Wolter Monginsidi dan percepatan pengerjaan jalan poros Kendari-Kolaka.

III. Peluang Perbankan Sulawesi Tenggara

Semenjak terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, telah terjadi akselerasi perubahan paradigma pembangunan ekonomi daerah dan krisis ekonomi tersebut telah menyebabkan kontraksi ekonomi Sulawesi Tenggara pada tahun 1998 sebesar 5,78 persen. Kondisi tersebut apabila dibiarkan akan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerintah pusat mengupayakan sedapat mungkin untuk diminimalisir melalui pemberlakuan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Inti UU dimaksud adalah pengalihan pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota mengingat selama ini penerimaannya dianggap relatif masih kecil dibandingkan pemerintah propinsi. Dalam rangka peningkatan penerimaan daerah kabupaten tersebut diperkenalkan jenis pajak baru yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yang memiliki potensi penerimaan yang cukup tinggi mengingat konsumsi bahan bakar yang

selalu meningkat dari waktu ke waktu. Meski demikian pemberlakuan UU tersebut dalam implementasinya diikuti pemberlakuan beberapa aturan pelaksanaan yang sedemikian rupa sehingga mengurangi beban ekonomi yang ditanggung ekonomi daerah. Pada akhirnya diharapkan akan semakin mendorong ekonomi daerah untuk bisa bertahan bahkan tumbuh meskipun krisis terjadi. Akibat langsung yang harus ditanggung pemerintah daerah adalah hilangnya pendapatan utama daerah, sehingga semakin mempersempit ruang geraknya dalam melakukan aktifitas pembangunan.

Krisis yang berkepanjangan dan kesulitan yang semakin berat dihadapi daerah telah melahirkan pemikiran bahwa konsep pembangunan terpusat telah menyebabkan ketidakmerataan pembangunan utamanya antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Kecemburuan daerah tersebut semakin menjadi dan berubah menjadi tuntutan agar pemerintah pusat memberlakukan otonomi daerah. Sebenarnya embrio untuk menjadikan masing-masing daerah sebagai suatu wilayah otonom sudah dipersiapkan sejak lama, akan tetapi munculnya ketidakpuasan daerah tersebut bahkan telah menimbulkan keinginan melepaskan diri (disintegrasi) bahkan gerakan separatisme. Selanjutnya kondisi tersebut ditanggapi pemerintah pusat dengan dikeluarkannya UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Pemberlakuan kedua UU tersebut ditanggapi daerah secara beragam, ada yang dengan alasan Otonomi Daerah melakukan penggantian pejabat di jajaran Pemda dengan personil asli daerah, penetapan jenis retribusi baru, undangan kepada investor luar negeri, menjalin hubungan kerjasama dengan negara tertentu dan lain-lain.

Reaksi berbeda yang muncul adalah ketidakpuasan perihal pembagian pendapatan migas untuk pusat dan daerah, pembentukan propinsi baru, dan lain-lain. Bahkan muncul perselisihan antar daerah terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam tertentu yang sebelumnya justru dinikmati bersama, dengan berlakunya UU tersebut maka segala sesuatunya diperhitungkan sebagai potensi pendapatan daerah.

Pemberlakuan UU dimaksud juga telah menyebabkan munculnya aksi-aksi penolakan laporan pertanggungjawaban Gubernur maupun Bupati di seluruh Sulawesi Tenggara. Sebagian masyarakat menganggap bahwa penolakan laporan pertanggungjawaban tahunan oleh DPRD merupakan alat yang sah turunnya gubernur dan bupati dari jabatannya. Akibatnya muncul friksi di masyarakat yang terkadang jauh dari arti kata pembangunan demokrasi. Pergeseran peran dan fungsi DPRD menjadi mitra bagi pemerintah daerah semakin menambah keragaman nuansa demokrasi. Untuk menambah kesiapan akan pemberlakuan Otonomi Daerah, maka dibentuklah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Keberadaan asosiasi tersebut akan sangat membantu upaya sosialisasi masalah otonomi daerah, munculnya gagasan bagi keseimbangan pembangunan pusat dan

daerah, bahkan menjadi *counterparty* bagi Departemen Dalam Negeri (Depdagri) sehubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang berdampak bagi pemerintah daerah.

Menanggapi kondisi yang terjadi, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Pendelegasian Kewenangan. Isi ketentuan tersebut menjelaskan mengenai kewenangan-kewenangan pemerintah pusat dan propinsi saja, sedangkan hal-hal yang tidak disinggung merupakan kewenangan pemerintah daerah otonom. Akibatnya muncul berbagai persepsi yang berbeda berkaitan dengan kewenangan masing-masing daerah otonom. Tarik menarik kewenangan seringkali terjadi terutama antara pemerintah daerah otonom dengan propinsi.

Untuk Propinsi Sulawesi Tenggara, pada saat penulisan laporan sedang dibahas Peraturan Daerah (PERDA) mengenai kewenangan daerah oleh DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara. Dengan adanya perda tersebut nantinya diharapkan otonomi daerah dapat diselenggarakan tepat waktu yaitu awal tahun 2001. Selain itu dipersiapkan pula Program Pembangunan Daerah (Propeda) sebagai landasan pelaksanaan pembangunan daerah di wilayah Sulawesi Tenggara.

Mempertimbangkan belum jelasnya cakupan kewenangan daerah otonom, maka dalam kajian ini tidak memperhitungkan potensi pendapatan yang akan diterima masing-masing daerah otonom sehubungan dengan pemberlakuan PP No.25 Tahun 2000 tersebut.

1. Dampak Pemberlakuan UU No. 18 Tahun 1997

Sebagaimana telah diutarakan, bahwa pemberlakuan UU No.18 Tahun 1997 memberi pengaruh terhadap ruang gerak pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah. Sebagai tindak lanjut pemberlakuan UU tersebut, maka dikeluarkan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah masing-masing :

- a. PP No.19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah
- b. PP No.20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah
- c. PP No.21 Tahun 1997 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Ketentuan ini masih ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Instruksi Mendagri No.9 dan No.10 Tahun 1998 yang intinya :

- a. Segera dilakukan inventarisasi dan penghentian semua pungutan daerah atas barang ekspor.
- b. Tidak melarang perdagangan barang/komoditi antar daerah tingkat I dan antar daerah tingkat II/pulau atau tidak melakukan kebijaksanaan tata niaga barang/komoditi masing-masing daerah tingkat I dan tingkat II.

- c. Mencabut larangan perdagangan barang/komoditi antar daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota.
- d. Terhitung mulai 23 Mei 1998 agar menghentikan semua pungutan pajak daerah propinsi dan kabupaten/kota serta retribusi daerah propinsi dan kabupaten/kota yang tidak terkait dengan UU No. 18 Tahun 1997 jo.PP No. 19 Tahun 1996 dan PP No. 20 Tahun 1997.

Sebagai konsekuensi pemberlakuan UU No.18 Tahun 1998 beserta ketentuan pelaksanaannya tersebut, di ruang lingkup Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara saja telah kehilangan 140 sumber penerimaan dengan total nilai Rp7,7 miliar pada tahun pemberlakuan. Hingga saat ini ketentuan dimaksud masih berlaku, oleh karenanya bermunculan seruan para kepala daerah agar ketentuan dimaksud dapat dicabut, hal ini mempertimbangkan besarnya potensi penerimaan daerah yang dapat dihimpun guna meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan daerah.

2. Kesiapan Perbankan Dalam Menyambut Era Otonomi Daerah

Sehubungan dengan krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, perbankan nasional mengalami berbagai kesulitan antara lain pembengkakan nilai dan pembayaran utang luar negeri, melonjaknya *non performing loan* (NPL), *negative spread*, kesulitan likuiditas dan lain-lain, penyelesaian secara intensif terus diupayakan pemerintah melalui Program Restrukturisasi Perbankan.

Selama periode tersebut kegiatan operasional perbankan sebagai lembaga intermediasi belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Konsolidasi intern dan belum kondusifnya iklim dunia usaha menjadi salah satu penyebab fungsi perbankan belum optimal. Kondisi yang terjadi secara nasional tersebut juga memberikan dampak pada operasional perbankan Sulawesi Tenggara. Meski demikian latar belakang pendirian cabang bank (sebagian kantor bank berfungsi sebagai *deposit taking*) juga berpengaruh terhadap akselerasi berjalannya fungsi bank sebagai lembaga intermediasi tersebut atau yang lebih populer dengan aktivitas penyaluran kredit (*lending*) perbankan di Sulawesi Tenggara.

Di Propinsi Sulawesi Tenggara terdapat 8 bank meliputi 20 kantor cabang dan 23 kantor cabang pembantu, kantor kas, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit yang tersebar di berbagai pelosok. Diantara 8 bank tersebut, hanya 1 bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Kendari yaitu Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara meliputi 1 kantor pusat, 4 kantor cabang, dan 3 kantor cabang pembantu. Oleh karenanya diantara bank di Sulawesi Tenggara hanya BPD Sultra saja yang dapat mengambil kebijakan strategis terkait dengan operasional dan perencanaan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan seluruh pimpinan kantor pusat dan kantor cabang bank yang beroperasi di Propinsi Sulawesi Tenggara, dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Kondisi dan Kendala Operasional

Sehubungan dengan operasional dan peningkatan kualitas pelayanannya, perbankan Sulawesi Tenggara menghadapi kendala sebagai berikut :

- a. Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia berikut kantor cabang bank sehingga pelayanan bank belum menjangkau seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
- b. Hubungan antara perbankan dengan pemerintah daerah belum berjalan sebagaimana yang diharapkan sehingga banyak potensi ataupun peluang peningkatan kontribusi perbankan dalam pembangunan daerah tidak termanfaatkan.
- c. Khusus perbankan Kabupaten Buton merasakan kendala terkait dengan tingginya transaksi giro antar bank yang selama ini dilakukan secara manual, oleh karenanya keberadaan kliring lokal akan sangat membantu kelancaran aktivitas sistem pembayaran.

2. Ruang Lingkup Kewenangan Pimpinan Cabang

- a. Melaporkan dan meminta persetujuan rekrutmen kebutuhan tenaga baru kepada Kantor Wilayah dan setelah disetujui kemudian melakukan proses seleksi pegawai baru.
- b. Melakukan identifikasi dan studi kelayakan potensi daerah/lokasi tertentu bagi pendirian kantor cabang bank baru, kemudian mengusulkannya ke Kanwil/Kantor Pusat bank.
- c. Pengajuan rencana investasi aktiva baik jangka pendek maupun menengah dan panjang kepada Kanwil/Kantor Pusat bank untuk mendapatkan persetujuan.
- d. Persetujuan kredit sampai dengan batas kewenangan dan selebihnya harus mendapatkan persetujuan secara berjenjang dari Kanwil maupun Kantor Pusat.
- e. Persetujuan penarikan dana nasabah sampai dengan batas kewenangan dan selebihnya harus mendapatkan persetujuan secara berjenjang dari Kanwil maupun Kantor Pusat.

3. Langkah-Langkah yang telah dan akan dilakukan sehubungan dengan pemberlakuan UU No.22 dan No.25 Tahun 1999.

- a. Mempersiapkan sumber daya yang ada sedini mungkin termasuk percepatan pelaksanaan kegiatan tertentu yang sebelumnya belum berfungsi sehubungan adanya konsolidasi intern.
- b. Sejauh ini sebagian besar perbankan Sultra belum sepenuhnya memahami UU No. 22 dan No. 25 serta pengaruhnya terhadap pembangunan daerah. Oleh karenanya perbankan Sultra mengharapkan diselenggarakannya sosialisasi terkait dengan materi dimaksud oleh Pemerintah propinsi ataupun kabupaten.
- c. Mengajukan permintaan kepada Kanwil/Kantor Pusat terkait dengan kewenangan yang lebih besar utamanya menghadapi pemberlakuan UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999.
- d. Masing-masing bank sedang melakukan pendekatan dengan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota terkait beberapa hal sebagai berikut :
 - Penempatan dana APBD baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan.
 - Pengembangan sektor tertentu yang dianggap potensial akan tetapi memerlukan dukungan dari pemerintah propinsi dan kabupaten/kota.

3. Analisis Kualitatif Peran Perbankan

Kuesioner yang telah dibagikan kepada 223 responden di seluruh Propinsi Sulawesi Tenggara diolah dengan menggunakan metode *net ballance*. Pada dasarnya metode net ballance atau saldo bersih ini dilihat dari selisih persentase responden yang menjawab naik dengan persentase responden yang menjawab turun. Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner dimaksud, dapat diindikasikan bahwa potensi peningkatan peran perbankan masih cukup besar di tahun 2001. Hal ini tercermin dari tingginya ekspektasi peningkatan pendapatan masyarakat terkait dengan kemungkinan pemberlakuan UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 yang disertai dengan semakin kondusifnya iklim perekonomian di Sulawesi Tenggara.

Besarnya harapan masyarakat akan hal tersebut di atas perlu mendapatkan dukungan riil dari perbankan melalui penyediaan pelayanan yang lebih memadai dan peningkatan jangkauan pelayanan, mengingat dari hasil kuisioner tersebut menunjukkan keberadaan perbankan belum sepenuhnya dimanfaatkan masyarakat secara optimal. Oleh karenanya sosialisasi produk-produk perbankan masih perlu lebih digiatkan agar masyarakat semakin mengetahui betapa pentingnya peran dan fungsi bank tersebut. Meski demikian hal lain

juga bisa terjadi adalah *masih tingginya tingkat suku bunga kredit, masih sulitnya akses masyarakat untuk mendapatkan kredit, dan belum optimalnya fungsi pelayanan* perbankan sehingga mereka lebih tertarik untuk menanamkan dananya pada hal-hal yang bersifat spekulatif dan non produktif. Hal diatas dapat dilihat secara lengkap pada tabel berikut :

Tabel 4. Hasil Kuisioner Potensi Peningkatan Peran Perbankan (persen)

I T E M S	Jawaban	Kota Kendari		Kab. Kendari		Kab. Kolaka		Kab. Muna		Kab. Buton		Prop. Sultra	
		R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P
1. Nilai Pendapatan Operas.	Meningkat	54,55	52,73	30,77	79,49	22,2	56,56	26,47	64,71	25,00	77,5	33,33	64,79
2. Pemanfaatan Kredit dari Bank	Meningkat	3,64	29,09	17,95	10,26	6,67	11,11	5,88	26,47	5,00	20,00	7,51	19,72
3. Penempatan dana dalam bentuk simpanan	Meningkat	23,64	20,00	5,13	15,38	8,89	22,22	11,76	41,18	17,50	40,00	14,08	26,76
4. Penempatan dana dalam bentuk giro di bank	Meningkat	23,64	23,64	12,82	10,26	6,67	15,56	17,65	17,65	10,00	17,50	14,55	17,37
5. Penempatan dana dalam bentuk tabungan di bank	Meningkat	10,91	12,73	15,38	25,64	-4,4	4,4	14,71	32,35	5,00	22,50	7,98	18,31
6. Penempatan dana dalam bentuk deposito di bank	Meningkat	3,70	10,91	7,69	2,56	0,00	2,22	-5,88	-2,94	0,00	0,00	1,41	3,29
7. Penetapan suku bunga kredit investasi bank	Meningkat	-5,56	-1,82	5,13	5,13	-4,44	-4,44	-5,88	-8,82	-2,50	-7,50	-2,83	-3,29
8. Penetapan suku bunga kredit modal kerja bank	Meningkat	-5,56	-1,82	-10,26	5,13	-4,44	-4,44	-11,76	-11,76	-2,50	2,50	-6,60	-3,29
9. Intensitas pemanfaatan fasilitas bank selain kredit dan simpanan	Meningkat	9,09	9,09	7,69	10,26	2,22	2,22	32,35	41,18	10,00	0,00	11,27	11,27

Keterangan : R = Realisasi P = Perkiraan

Kecenderungan yang hampir sama juga terjadi pada masing-masing Kabupaten/ Kota di Propinsi Sulawesi Tenggara, ekspektasi akan meningkatnya pendapatan masyarakat pada tahun 2001 cukup tinggi. Dalam pada itu keinginan masyarakat untuk memanfaatkan jasa perbankan masih perlu dioptimalkan lagi. Hal ini terlihat pada rendahnya persentase (< 50 persen) yang dihasilkan pada setiap jawaban atas pos pertanyaan yang diajukan kepada responden.

Berdasarkan masing-masing sektor, hampir seluruh sektor di seluruh kabupaten/ kotamadya menunjukkan ekspektasi peningkatan pendapatan pada tahun 2001. Dalam hal sektor-sektor yang memiliki hubungan dengan pelayanan perbankan, teridentifikasi bahwa masing-masing kabupaten/ kotamadya memiliki karakteristik tersendiri. Tingginya persentase jawaban atas masing-masing pos pertanyaan pada sektor-sektor tersebut antara lain disebabkan oleh rendahnya responden pada sektor bersangkutan, oleh karenanya untuk mengurangi resiko bias pemahaman yang tinggi maka penganalisaan dilakukan hanya pada 4 sektor yang memiliki distribusi terbesar dalam penyaluran kredit perbankan di Sulawesi Tenggara per Agustus 2000 meliputi sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor konstruksi dan sektor pengangkutan, sebagai hasilnya diperoleh sektor-sektor potensial bagi pelayanan perbankan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5. Sektor-Sektor Potensial

Keterangan	Kota Kendari	Kab. Kendari	Kab. Kolaka	Kab. Muna	Kab. Buton
	Sektor	Sektor	Sektor	Sektor	Sektor
Nilai Pendapatan Operas.	4, 2 & 3	1, 4, 3 & 2	4, 1 & 2	2 & 1	4, 2, 1& 3
Pemanfaatan Kredit dari Bank	3	3	2 & 3	4	3
Penempatan dana dalam bentuk simpanan	3	3	2	2	3 & 4
Penempatan dana dalam bentuk giro di bank	3	3	4	4	3
Penempatan dana dalam bentuk tabungan di bank	3	3, 2 & 1	2	2 & 3	3
Penempatan dana dalam bentuk deposito di bank	4	4	-	2	2
Penetapan suku bunga kredit investasi bank	2	4 & 2	2	4	3
Penetapan suku bunga kredit modal kerja bank	1	3	-	4	3
Intensitas pemanfaatan fasilitas bank	3	3	1	3	3

Keterangan :

1 = Sektor Pertanian

3 = Sektor Konstruksi

2 = Sektor Perdagangan

4 = Sektor Pengangkutan

3.1 Analisis Data Kuantitatif Daerah Otonomi

a. Penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU)

Sebagaimana telah ditegaskan pada UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka sumber pembiayaan pembangunan Daerah Otonom akan berasal dari :

1. Pendapatan Asli daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain Penerimaan yang sah

Mengingat pentingnya sumber pembiayaan tersebut bagi daerah otonom maka optimalisasi penghimpunan dana dari 4 sumber diatas senantiasa diupayakan oleh daerah otonom dalam rangka meningkatkan kemandirian dan sekaligus dalam menjalankan roda pembangunan daerah.

Oleh karena perolehan sumber pembiayaan bagi pembangunan pada awal pemberlakuan UU dimaksud diluar pendapatan asli daerah (PAD), Dana Bagi Hasil dan DAU belum dapat diharapkan, serta mengingat sementara ini belum ada aturan hukum (Perda) yang mengatur kewenangan masing-masing daerah otonom maka penggalan sumber dana bagi pembiayaan melalui pinjaman daerah maupun diversifikasi jenis-jenis sumber pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi baru belum dapat dilaksanakan. Selain itu harapan Daerah Otonom untuk memperoleh Dana Perimbangan cq Dana Alokasi Khususpun tidak terlalu diharapkan oleh daerah (kecuali daerah penghasil dana reboisasi)

mengingat tujuan pengalokasian dana tersebut untuk membantu membiayai kebutuhan khusus dengan tetap memperhatikan kemampuan APBN.

Mempertimbangkan kondisi dan karakter keuangan kabupaten dan kotamadya di Propinsi Sulawesi Tenggara selama ini, berbagai keterbatasan yang ada telah menyebabkan perlunya upaya maksimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD) sehingga mampu meningkatkan kontribusinya bagi sumber pembiayaan. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan perolehan pendapatan daerah dari sumber-sumber pendapatan yang telah ada maupun melalui penggalan sumber-sumber pendapatan baru. Adapun masih rendahnya PAD kabupaten dan 1 kotamadya di Propinsi Sultra menunjukkan potensi peningkatan kontribusi masyarakat terhadap pembiayaan pembangunan masih cukup besar sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Pendapatan Asli Daerah Otonom Sulawesi Tenggara

No.	KABUPATEN/KOTA	APBD TH. 1998/99		
		PAD (Rp. 000)	APBD (Rp. 000)	PAD/APBD
1	Kotamadya Kendari	3.591.415	26.832.371,00	13,38 %
2	Kabupaten Kendari	2.300.386	79.846.677,00	2,88 %
3	Kabupaten Kolaka	1.464.197	45.890.638,00	3,19 %
4	Kabupaten Muna	1.221.000	60.471.000,00	2,02 %
5	Kabupaten Buton	1.926.220	87.846.420,00	2,19 %
	Jumlah	10.503.218	300.887.106	3,49 %

Sumber : Data Keuangan Daerah Kabupaten / Kotamadya Se-Sultra

Oleh karenanya Dana Alokasi Umum (DAU) dipandang sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang sangat diharapkan oleh daerah otonom untuk sarana dan prasarana. Berkenaan dengan penghitungan DAU sebagaimana telah ditegaskan dalam UU No.25 Tahun 1999 merupakan wewenang Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian ditetapkan pada peraturan pemerintah. Meski demikian untuk keperluan penulisan, maka sementara ini sedang dikembangkan 3 model penghitungan alokasi DAU masing-masing oleh Dr. Machfud Siddiq, Msc dan penghitungan DAU berdasar Karakteristik Daerah I dan II dengan variabel dan bobot sebagai berikut :

Tabel 7. Bobot Variabel Penghitungan Dana Alokasi Umum

Variabel	Bobot Variabel Menurut		
	Dr. Machfud Siddiq Msc	Karakteristik Daerah I	Karakteristik Daerah II
Penduduk	20%	10%	25%
Luas Wilayah	20%	10%	10%
Penduduk Miskin	10%	20%	20%
PDRB	15%	15%	10%
PAD / APBD	15%	25%	20%
Pemerataan	20%	20%	15%
Total	100%	100%	100%

Dengan asumsi RAPBN 2001 yang diajukan Pemerintah disetujui DPR untuk ditetapkan sebagai APBN 2001 di mana penerimaan dalam negeri dianggarkan sebesar Rp242.996,7 miliar, maka dengan menggunakan asumsi nilai alokasi DAU sebagaimana pos DAU RAPBN dimaksud dan perhitungan 2 model di atas maka perolehan dana DAU masing-masing pemerintah propinsi, kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara sebagai berikut :

Tabel 8. Alokasi DAU Kabupaten/Kota se-Propinsi Sulawesi Tenggara (miliar Rp)

No.	Kabupaten/Kota	Model Dr. Machfud Siddiq Msc	Bobot	Model Karakteristik Daerah I	Bobot	Model Karakteristik Daerah II	Bobot
1	Kotamadya Kendari	186,91	90%	231,42	90%	116,43	90%
2	Kabupaten Kendari	241,81		211,15		158,19	
3	Kabupaten Kolaka	204,75		185,28		119,30	
4	Kabupaten Muna	152,94		147,17		92,30	
5	Kabupaten Buton	193,34		184,99		138,99	
Prop. Sulawesi Tenggara		108,86	10%	106,67	10%	92,74	10%
TOTAL		1.088,62	100%	1.066,70	100%	927,44	100%

Dalam kajian ini diasumsikan bahwa model karakteristik daerah II adalah alat ukur yang dipergunakan dalam alokasi DAU bagi pemerintah daerah. Dengan pertimbangan perkiraan paling moderat dan mempertimbangkan peran pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik dan sekaligus memperhatikan aspek distribusi (pemerataan). Perkiraan alokasi DAU saat ini menggunakan asumsi propinsi berjumlah 26. Adanya fenomena dibentuknya beberapa propinsi, maka perkiraan DAU Sulawesi Tenggara kemungkinan akan menurun yang disebabkan menurunnya bobot perhitungan komponen PDRB atas dasar harga konstan, rasio PAD/ APBD dan pemerataan. Berdasarkan model dimaksud total dana yang merupakan sumber pembiayaan daerah otonom di Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2001 sekitar Rp927,44 miliar yang berarti jauh melampaui perkiraan APBD yang sekitar Rp343 miliar. Dengan demikian aliran masuk DAU yang menjadi kewenangan daerah, Sulawesi Tenggara secara umum akan mengalami *over liquidity*.

b. Analisis Model

Dengan menggunakan data bulanan dari April 1997 sampai dengan Desember 1999 dihasilkan persamaan estimasi kabupaten dan kota di Propinsi Sulawesi Tenggara yang mencakup pola konsumsi, PDRB berlaku, penghimpunan dana, dan penyaluran kredit. Perbedaan perilaku variabel yang diamati masing-masing daerah mengakibatkan tidak adanya keseragaman variabel independen atas pola yang sama di masing-masing daerah tersebut. Model-model yang diperoleh dapat dilihat pada *tabel lampiran*, sedangkan hasil proyeksi model untuk masing-masing daerah otonom dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Hasil Proyeksi Model Ekonomi Daerah Otonom

Keterangan	Proyeksi Pertumbuhan Tahun 2001				
	Kota Kendari	Kab. Kendari	Kab. Kolaka	Kab. Muna	Kab. Buton
Pola Konsumsi	8% s/d 12%	17% s/d 22%	-10% s/d -20%	17% s/d 22%	20% s/d 25%
PDRB Berlaku	40% s/d 45%	36% s/d 41%	6% s/d 11%	19% s/d 24%	25% s/d 30%
Posisi Penghimpunan Dana	105% s/d 110%	43% s/d 47%	16% s/d 21%	21% s/d 26%	34% s/d 39%
Posisi Penyaluran Kredit	-1% s/d -6%	-20% s/d -25%	-2% s/d 3%	-1% s/d -6%	8% s/d 13%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa implementasi UU No. 22 dan No. 25 tahun 1999, akan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi Sulawesi Tenggara. Peningkatan dana bagi pembiayaan pembangunan pasca pemberlakuan UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 diperkirakan akan berpengaruh terhadap pendapatan (tercermin pada proyeksi PDRB berlaku) sekaligus perilaku konsumsi masyarakat. Lonjakan yang diperkirakan terjadi terhadap posisi penghimpunan dana masyarakat oleh perbankan di seluruh daerah otonom nantinya merupakan implikasi langsung dari peningkatan pendapatan masyarakat dan alokasi dana pembangunan bagi pemerintah daerah otonom. Lonjakan penghimpunan dana tertinggi diperkirakan akan terjadi di Kota Kendari mengingat luas dan baiknya pelayanan fasilitas perbankan yang disediakan sebagaimana tercermin pada jumlah bank dan kantor bank, jumlah anjungan tunai mandiri (ATM), fasilitas *auto debit* pada beberapa *counter* dan lain-lain. Selain itu lonjakan diperkirakan akibat meningkatnya pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah propinsi (berada di Kota Kendari) baik dalam bentuk gaji pegawai maupun pengeluaran lain yang hampir sepenuhnya dibelanjakan di Kota Kendari.

Implikasi lain yang terjadi akibat meningkatnya pendapatan adalah meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat di masing-masing daerah otonom. Khusus Kabupaten Kolaka tingkat konsumsi masyarakat diperkirakan mengalami penurunan setelah tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan drastis sehubungan dengan lonjakan pendapatan masyarakat utamanya berasal dari penjualan hasil perkebunan (kakao).

Pada periode yang sama pula diperkirakan penyaluran kredit perbankan di seluruh daerah otonom kecuali Kabupaten Buton dan Kolaka akan mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi Agustus 2000. Penyaluran kredit dimaksud sebagai akibat berbagai kendala yang dihadapi perbankan baik yang berasal dari internal maupun dari ekstern bank sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya. Meski demikian pada saat yang sama perbankan di Kabupaten Buton dan Kolaka diperkirakan justru mengalami peningkatan. Pertambahan penduduk Kabupaten Buton yang cukup besar terutama berasal dari eksodus Ambon, diperkirakan akan menjadi pasar potensial bagi penyaluran kredit perbankan setempat.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pemberlakuan UU No. 22 dan No. 25 tahun 1999 diperkirakan memberikan pengaruh yang hampir seragam bagi pembangunan ekonomi masing-masing daerah otonom. Terlepas dari kontroversi ternasuk kesiapan daerah dalam menyerap potensi *over liquidity*, kesiapan sumber daya yang ada dalam menyambut pemberlakuan UU dimaksud, perbankan memiliki peluang untuk dapat meningkatkan peranannya dalam pembangunan ekonomi daerah maupun meningkatkan kinerja perbankan sendiri.

a. Kesimpulan

Dengan memperhatikan hasil kuesioner, karakteristik variabel independen dan hasil proyeksi model perilaku konsumsi, PDRB atas dasar harga berlaku, penghimpunan dana dan penyaluran kredit dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada era pemberlakuan kedua UU dimaksud diperkirakan akan terjadi peningkatan nilai pengeluaran pemerintah daerah otonom yang sumber dananya berasal dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Penerimaan Daerah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Selanjutnya diperkirakan laju kenaikan pendapatan akan lebih cepat dibandingkan dengan laju kenaikan konsumsi masyarakat atau dengan kata lain Sulawesi Tenggara memiliki angka *marginal propensity to saving* yang meningkat. Kenaikan MPS ini merupakan indikator awal terbukanya peluang perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
2. Pada posisi Desember 2001 penghimpunan dana masyarakat di perbankan diperkirakan akan tumbuh, yaitu : Kota Kendari tumbuh pada kisaran 105 persen s.d. 110 persen, Kabupaten Kendari 43 persen s.d 47 persen, Kolaka 16 persen s.d 21persen, Muna 21 persen s.d 26 persen dan Kabupaten Buton tumbuh pada kisaran 34 persen s.d 39 persen.
3. Perkiraan meningkatnya pendapatan masyarakat di daerah otonom, ternyata kurang diikuti perilaku masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan perbankan di luar penghimpunan dana seperti kredit, ataupun fasilitas lainnya.
4. Peningkatan pendapatan masyarakat tersebut memberikan implikasi berbeda (*ceteris paribus*) terhadap penyaluran kredit masing-masing daerah otonom, untuk Kabupaten Buton dan Kolaka yang pada posisi Desember 2001 diperkirakan tumbuh pada kisaran 8 s.d 13 persen dan – 2 persen s.d 3 persen dibandingkan dengan posisi Agustus 2000. Sedangkan Kota Kendari, Kabupaten Kendari dan Muna mengalami pertumbuhan negatif masing-masing pada kisaran 1 s.d 6 persen ; 20 persen s.d 25% dan 1 persen s.d 6 persen.

5. Tingginya laju pertumbuhan penghimpunan dana yang melampaui laju penyaluran kredit akan memberikan kesan bahwa perbankan cenderung berperilaku sebagai cabang penghimpun dana masyarakat.

b. Rekomendasi/saran

1. Dari sisi perbankan, perlu upaya untuk memanfaatkan peluang pemberlakuan otonomi daerah antara lain dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan merubah paradigma pendirian kantor bank dari fungsi penghimpunan dana menjadi fungsi penghimpun dana dan penyalur kredit. Sehubungan dengan itu maka sosialisasi mengenai peranan perbankan perlu ditingkatkan dengan menekankan pemahaman tentang prinsip kehati-hatian, perlu sosialisasi untuk mencapai kesamaan persepsi aspek kelayakan usaha perbankan dengan pengguna jasa perbankan dan produk-produk perbankan perlu ditingkatkan dalam rangka menarik minat para deposan serta meningkatkan batas wewenang memutus kredit masing-masing kantor cabang.
2. Dari sisi Bank Indonesia, Kantor Bank Indonesia Kendari sudah perlu untuk melakukan kajian kemungkinan pelaksanaan kliring lokal di Bau-Bau Kabupaten Buton dan Kolaka guna meningkatkan kelancaran lalu lintas sistem pembayaran. Di sisi lain KBI Kendari perlu untuk terus melakukan *technical assistant* kepada perbankan untuk mendorong pemberian kredit kepada usaha kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Anonim, Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Anonim, Bahan Sosialisasi Tugas-Tugas KBI di Sektor Moneter, Jakarta, 2000.

Anonim, Antisipasi Berlakunya UU Otonomi Daerah: Municipal Bond Bisa Biayai Daerah, Bisnis Indonesia edisi 10 Oktober 1999, Jakarta, 1999.

Insukindro, Penurunan Data Bulanan dari Data Tahunan, Ekonomi dan Keuangan Indonesia Vol. 38. No. 4, Jakarta, 1990.

....., Sindrum R² Dalam Analisis Regresi Linier Runtun Waktu, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 13, No. 4, hal. 1-11, Jakarta, 1998.

....., Modul Teori Pelatihan Ekonometrika Dasar untuk Pegawai Bank Indonesia, Yogyakarta, Juni 2000.

Samuelson and Nordhaus, Ekonomi Jilid 2 edisi keduabelas, diterjemahkan oleh AQ. Khalid, Erlangga, Jakarta, 1986.

Richard G. Lipsey and Peter O. Steiner, Economics sixth edition, Harper and Row Publisher, New York, 1981.

Boden, Mark and Ian , Services and the Knowledge Based Economy, P. Cm (science, technology, and the international political economy services) Continuum, New York, 2000.

Searle, R.J., Decentralisation, Intergovernmentment Grant and Equalisation. Some Principles and Administarive Issues, University of Indonesia, Jakarta, 20-21 March 2000.

Ter Minassian, Deficit Reduction, Decentralization Highlight Need to Manage Subnational Government Debt, IMF Survey.

Jusuf Abadi, HM., Otonomi Daerah di Sulawesi Tenggara, Kendari, 2000.

Ahmad, Ehtisham, Bert Hoffman, Jun Ma, Dick Rye, Bob Searle and Jim Stevenson, Expenditure Assignments and Management, Extract from Indonesia: Decentralization-Managing the Risk. Jakarta, June 1999.

Stefano Peperno, Fiscal Decentralization in Italy: Some Lessons (first draft), March 2000.

Paul Smoke, Fiscal Decentralisation in East and Southern Africa: A Selective Review of Experience and Thoughts on Moving Forward, prepared for: Conference on Fiscal Decentralization International Monetary Fund Whashington DC, November 20-21, 2000.

Seksi SKEM KBI Kendari

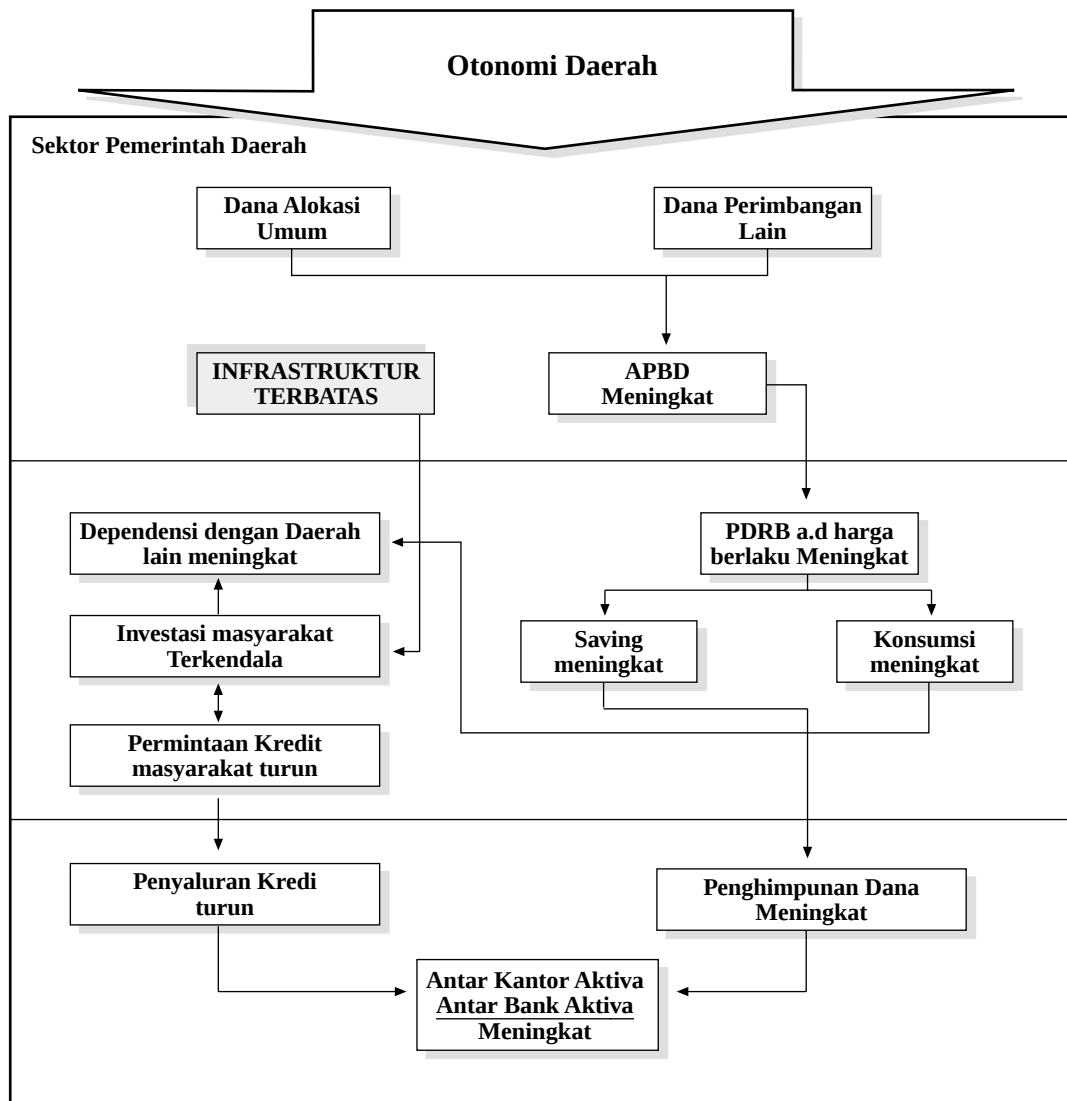
- Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Mokhammad Dakhlan, PBI Kendari atas kritik dan masukan hasil kajian ini.

1 Pengukuran dan Analisis Underlying dan Noise Inflation Kendari, KBI Kendari, 1999

L A M P I R A N

Lampiran 1

Skema Hasil Penelitian
Dampak Pemberlakuan Otonomi Daerah Terhadap Perbankan Sulawesi Tenggara



Lampiran 2

Metodologi Perhitungan dan Pengukuran

1. Analisa Data Kualitatif

Net Balance, Merupakan bentuk pengujian kualitatif untuk mengetahui kecenderungan atas jawaban responden melalui pemberian point atas 3 (tiga) jawaban dengan 2 (dua) berkebalikan dan 1 (satu) netral yang kemudian dilakukan set off seluruh jawaban yang ada. Kecenderungan baru diperoleh setelah didapatkan nilai hasil set off, dimana nilai positif menunjukkan kecenderungan dan ekspektasi meningkat dan sebaliknya negatif mencrminkan kecenderungan yang menurun, sedangkan apabila nilai tersebut adalah nol berarti tidak ada perubahan ekspektasi.

2. Analisa Data Kuantitatif

Pelaksanaan pengukuran difokuskan menggunakan pendekatan statistik dan penggunaan metodologi ekonometri, utamanya dalam pembentukan model-model mengacu pada ketersediaan data baik jumlah variabel maupun seriesnya.

Penganalisaan data kuantitatif utamanya dilakukan untuk terciptanya suatu model-model ekonomi atas indikator-indikator yang diinginkan. Pembentukan model dilakukan melalui berbagai tahap-tahap, yaitu meliputi penentuan dasar teori ekonomi, pengumpulan dan pemisahan data yang relevan, pembentukan model, pengujian model dan prediksi/ peramalan.

A. Penentuan dasar teori

Sehubungan dengan cakupan penelitian meliputi identifikasi indikator ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, maka dipergunakan beberapa variabel yang relevan dengan cakupan dimaksud. Fungsi pendapatan masyarakat, fungsi konsumsi, fungsi kredit dan fungsi penghimpunan dana masyarakat dijadikan sebagai dasar teori. Penggunaan fungsi-fungsi dimaksud terkait dengan kemungkinan perubahan kebijakan fiskal pemerintah yang mengakibatkan pergeseran-pergeseran variabel ekonomi lain. Sebagaimana telah diketahui bahwa produk nasional bruto untuk perekonomian terbuka merupakan penjumlahan beberapa variabel sbb :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan :

Y = Produk Domesti Bruto

C = Konsumsi Masyarakat

I = Investasi Masyarakat

G = Pengeluaran Pemerintah

X = Transaksi Ekspor

M = Transaksi Impor

B. Pengumpulan dan pemisahan data yang relevan

Dalam pengumpulan data-data atas variabel-variabel yang akan digunakan dalam pembentukan model ekonomi, adalah wajar apabila terjadi ketidaksinkronan atas jenis dan series data yang diharapkan dengan data yang diperoleh. Ketidaksinkronan tersebut secara teori diyakini akan menyebabkan terbentuknya suatu model yang secara ekonometrik mengandung beberapa kelemahan. Oleh karenanya pada beberapa kasus dilakukan interpolasi yang juga berisiko terhadap semakin berkurangnya tingkat keakuratan data yang digunakan.

Sehubungan dengan keterbatasan supply data yang ada pada penulisan ini, maka dilakukan pendekatan metode interpolasi melalui transformasi linier mengacu kepada formulasi berikut (Insukindro, 1988):

$$Mth_k = 1/12 Yt \left[(1 + ((k - 6,5) \times 12^{(1-L)})) \right]$$

Keterangan : Mth_k = Data Bulanan

Yt = Data Tahunan

K = 1,2,, 12

L = Operasi Kelambanan

C. Pembentukan model

Pembentukan model didasarkan atas teori ekonomi yang relevan dan ketersediaan data series, meski demikian pembentukan model sedapat mungkin agar diperoleh penaksiran yang tidak bias, linier dan terbaik atau BLUE (best linier unbiased estimator) sebagaimana yang diungkapkan Gauss. Dalam pada itu juga untuk mempermudah proses

pembentukan model dimaksud maka dimanfaatkan Program Eviews. Meski demikian disadari untuk mendapatkan model sebagaimana disebutkan di atas tidaklah mudah dengan mempertimbangkan keakuratan dan keterbatasan jenis data maka penulis sengaja menambah beberapa judgement-judgement sebagai pelengkap. Selain itu pembentukan model juga sebisa mungkin mengacu kepada kesederhanaan (*parsimony*), data tidak menyimpang dari definisi ekonomi (*data admissibility*), model koheren dengan data (*coherency*), parameter yang diamati konstan (*constant parameter*), dan konsistensi dengan teori yang dipilih (*theoretical consistency*). Pemenuhan persyaratan klasik bagi suatu model juga perlu diperhatikan, pemenuhan ini meliputi tidak ada multikolinieritas, tidak mengalami heteroskedastisitas dan tidak mengalami otokorelasi. Kemudian diikuti dengan penggunaan beberapa model pengujian antara lain AIC dan SCHWARZ criterion pada program EIEWS.

D. Pengujian model

Tujuan pengujian model adalah untuk menghilangkan kesan bahwa hasil yang diperoleh bukan merupakan suatu kebetulan. Pengujian lain yang dilakukan adalah melalui penggunaan data series yang telah ada sesuai dengan model sehingga diperoleh masing-masing nilai estimasi. Nilai estimasi tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai aktual.

E. Prediksi/peramalan

Dilakukan untuk memperoleh nilai estimasi setiap varabel yang dicari pada tahun 2001 yang meliputi data-data konsumsi, posisi kredit dan posisi penghimpunan dana masyarakat pada setiap kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Untuk data diluar itu yaitu PDRB Berlaku merupakan bentuk penjumlahan didasarkan atas dasar teori yang ada dengan asumsi sistem ekonomi tertutup.

Lampiran 3

SIMULASI DANA ALOKASI UMUM DI PROPINSI SULAWESI TENGGARA^a

Machfud Sidiq

No.	Propinsi	Penduduk ¹ (Bobot 20%)			Luas Wilayah ² (Bobot 20%)			Penduduk Miskin ³ (Bobot 10%)			PDRB non Migas a.d harga konstan ⁴ (Bobot 15%)			PAD/APBD ⁵ (Bobot 15%)			Pemerataan (Bobot 20%)	
		Jumlah	%	Alokasi	Luas	%	Alokasi	Jumlah	%	Alokasi	Jumlah	%	Alokasi	Rasio	%	Alokasi	%	Alokasi
1	DI Aceh	3,847	1.98	222	55,390	2.88	323	425,598	1.92	108	1,520,394	3.19	268	11.58	2.60	218	3.85	431
2	Sumatera Utara	11,115	5.73	642	71,680	3.73	418	1,234,194	5.56	312	1,881,831	3.94	332	21.17	4.75	399	3.85	431
3	Sumatera Barat	4,323	2.23	250	42,898	2.23	250	384,582	1.73	97	1,664,561	3.49	293	17.30	3.88	326	3.85	431
4	Riau	3,900	2.01	225	94,561	4.92	551	322,018	1.45	81	2,021,680	4.24	356	18.75	4.21	354	3.85	431
5	Jambi	2,370	1.22	137	53,436	2.78	311	222,842	1.00	56	1,144,240	2.40	202	12.19	2.73	230	3.85	431
6	Sumatera Selatan	7,208	3.72	417	109,254	5.68	637	794,870	3.58	201	1,466,602	3.07	258	14.92	3.35	281	3.85	431
7	Bengkulu	1,409	0.73	81	19,789	1.03	115	137,239	0.62	35	1,078,502	2.26	190	11.95	2.68	225	3.85	431
8	Lampung	6,658	3.43	385	35,385	1.84	206	724,856	3.27	183	958,465	2.01	169	15.11	3.39	285	3.85	431
9	DKI Jakarta	9,113	4.70	527	664	0.03	4	231,331	1.04	58	6,073,540	12.73	1,070	60.13	13.49	1,134	3.85	431
10	Jawa Barat	39,207	20.22	2,266	43,177	2.25	252	3,962,111	17.86	1,001	1,341,317	2.81	236	29.14	6.54	549	3.85	431
11	Jawa Tengah	29,653	15.29	1,714	32,549	1.69	190	4,157,299	18.74	1,050	1,159,628	2.43	204	22.03	4.94	415	3.85	431
12	DI Yogyakarta	2,917	1.50	169	3,186	0.17	19	303,768	1.37	77	1,561,275	3.27	275	23.99	5.38	452	3.85	431
13	Jawa Timur	33,844	17.45	1,956	47,923	2.49	279	4,046,529	18.24	1,022	1,562,299	3.27	275	27.30	6.12	515	3.85	431
14	Bali	2,896	1.49	167	5,633	0.29	33	125,600	0.57	32	2,420,573	5.07	426	37.33	8.37	704	3.85	431
15	Nusa Tenggara Barat	3,646	1.88	211	20,153	1.05	117	653,026	2.94	165	845,596	1.77	149	12.95	2.91	244	3.85	431
16	Nusa Tenggara Timur	3,577	1.84	207	47,349	2.46	276	748,974	3.38	189	718,260	1.51	127	9.65	2.16	182	3.85	431
17	Kalimantan Barat	3,636	1.88	210	146,807	7.64	856	820,490	3.70	207	1,785,743	3.74	315	10.69	2.40	202	3.85	431
18	Kalimantan Tengah	1,627	0.84	94	153,564	7.99	895	189,414	0.85	48	2,321,400	4.87	409	5.37	1.20	101	3.85	431
19	Kalimantan Selatan	2,893	1.49	167	36,535	1.90	213	424,279	1.91	107	1,903,203	3.99	335	14.18	3.18	267	3.85	431
20	Kalimantan Timur	2,314	1.19	134	210,985	10.97	1,230	224,561	1.01	57	4,508,068	9.45	794	15.25	3.42	288	3.85	431
21	Sulawesi Utara	2,649	1.37	153	27,488	1.43	160	617,131	2.78	156	1,332,033	2.79	235	11.82	2.65	223	3.85	431
22	Sulawesi Tengah	1,938	1.00	112	63,689	3.31	371	139,394	0.63	35	1,080,453	2.26	190	7.13	1.60	134	3.85	431
23	Sulawesi Selatan	7,558	3.90	437	62,483	3.25	364	284,648	1.28	72	1,180,528	2.47	208	16.47	3.69	311	3.85	431
24	Sulawesi Tenggara	1,587	0.82	92	38,140	1.98	222	163,372	0.74	41	917,090	1.92	162	7.47	1.68	141	3.85	431
25	Maluku	2,087	1.08	121	77,871	4.05	454	417,047	1.88	105	1,342,645	2.81	237	7.25	1.63	137	3.85	431
26	Irian Jaya	1,943	1.00	112	421,981	21.95	2,460	427,827	1.93	108	3,920,595	8.22	691	4.65	1.04	88	3.85	431
INDONESIA		193,915	100.00	11,207	1,922,570	100.00	11,207	22,183,000	100.00	5,603	47,710,521	100.00	8,405	446	100.00	14,008	100	11,218

Ket : 1 : Berdasarkan SUPAS 1995

2 : Berdasarkan Statistik Indonesia tahun 1999

3 : Berdasarkan Statistik Indonesia tahun 1996

4 : Berdasarkan Statistik Indonesia tahun 1999

5 : Berdasarkan Statistik Indonesia tahun 1996

a : Asumsi penerimaan dalam negeri sesuai RAPBN 2001 sebesar Rp242.996,7 miliar

DAU ditetapkan setelah dikurangi dengan bagi hasil sebesar Rp56.033,5 miliar

Lampiran 4

SIMULASI DANA ALOKASI UMUM DI PROPINSI SULAWESI TENGGARA*

Karakteristik Daerah I

No.	Propinsi	Penduduk ¹ (Bobot 20%)			Luas Wilayah ² (Bobot 20%)			Penduduk Miskin ³ (Bobot 10%)			PDRB non Migas a.d harga konstan ⁴ (Bobot 15%)			PAD/APBD ⁵ (Bobot 15%)			Pemerataan (Bobot 20%)	
		Jumlah	%	Alokasi	Luas	%	Alokasi	Jumlah	%	Alokasi	Jumlah	%	Alokasi	Rasio	%	Alokasi	%	Alokasi
1	DI Aceh	3,847	1.98	111	55,390	2.88	161	425,598	1.92	215	1,520,394	3.19	268	11.58	2.60	364	3.85	431
2	Sumatera Utara	11,115	5.73	321	71,680	3.73	209	1,234,194	5.56	624	1,881,831	3.94	332	21.17	4.75	665	3.85	431
3	Sumatera Barat	4,323	2.23	125	42,898	2.23	125	384,582	1.73	194	1,664,561	3.49	293	17.30	3.88	544	3.85	431
4	Riau	3,900	2.01	113	94,561	4.92	276	322,018	1.45	163	2,021,680	4.24	356	18.75	4.21	589	3.85	431
5	Jambi	2,370	1.22	68	53,436	2.78	156	222,842	1.00	113	1,144,240	2.40	202	12.19	2.73	383	3.85	431
6	Sumatera Selatan	7,208	3.72	208	109,254	5.68	318	794,870	3.58	402	1,466,602	3.07	258	14.92	3.35	469	3.85	431
7	Bengkulu	1,409	0.73	41	19,789	1.03	58	137,239	0.62	69	1,078,502	2.26	190	11.95	2.68	376	3.85	431
8	Lampung	6,658	3.43	192	35,385	1.84	103	724,856	3.27	366	958,465	2.01	169	15.11	3.39	475	3.85	431
9	DKI Jakarta	9,113	4.70	263	664	0.03	2	231,331	1.04	117	6,073,540	12.73	1,070	60.13	13.49	1,890	3.85	431
10	Jawa Barat	39,207	20.22	1,133	43,177	2.25	126	3,962,111	17.86	2,002	1,341,317	2.81	236	29.14	6.54	916	3.85	431
11	Jawa Tengah	29,653	15.29	857	32,549	1.69	95	4,157,299	18.74	2,100	1,159,628	2.43	204	22.03	4.94	692	3.85	431
12	DI Yogyakarta	2,917	1.50	84	3,186	0.17	9	303,768	1.37	153	1,561,275	3.27	275	23.99	5.38	754	3.85	431
13	Jawa Timur	33,844	17.45	978	47,923	2.49	140	4,046,529	18.24	2,044	1,562,299	3.27	275	27.30	6.12	858	3.85	431
14	Bali	2,896	1.49	84	5,633	0.29	16	125,600	0.57	63	2,420,573	5.07	426	37.33	8.37	1,173	3.85	431
15	Nusa Tenggara Barat	3,646	1.88	105	20,153	1.05	59	653,026	2.94	330	845,596	1.77	149	12.95	2.91	407	3.85	431
16	Nusa Tenggara Timur	3,577	1.84	103	47,349	2.46	138	748,974	3.38	378	718,260	1.51	127	9.65	2.16	303	3.85	431
17	Kalimantan Barat	3,636	1.88	105	146,807	7.64	428	820,490	3.70	415	1,785,743	3.74	315	10.69	2.40	336	3.85	431
18	Kalimantan Tengah	1,627	0.84	47	153,564	7.99	448	189,414	0.85	96	2,321,400	4.87	409	5.37	1.20	169	3.85	431
19	Kalimantan Selatan	2,893	1.49	84	36,535	1.90	106	424,279	1.91	214	1,903,203	3.99	335	14.18	3.18	446	3.85	431
20	Kalimantan Timur	2,314	1.19	67	210,985	10.97	615	224,561	1.01	113	4,508,068	9.45	794	15.25	3.42	479	3.85	431
21	Sulawesi Utara	2,649	1.37	77	27,488	1.43	80	617,131	2.78	312	1,332,033	2.79	235	11.82	2.65	371	3.85	431
22	Sulawesi Tengah	1,938	1.00	56	63,689	3.31	186	139,394	0.63	70	1,080,453	2.26	190	7.13	1.60	224	3.85	431
23	Sulawesi Selatan	7,558	3.90	218	62,483	3.25	182	284,648	1.28	144	1,180,528	2.47	208	16.47	3.69	518	3.85	431
24	Sulawesi Tenggara	1,587	0.82	46	38,140	1.98	111	163,372	0.74	83	917,090	1.92	162	7.47	1.68	235	3.85	431
25	Maluku	2,087	1.08	60	77,871	4.05	227	417,047	1.88	211	1,342,645	2.81	237	7.25	1.63	228	3.85	431
26	Irian Jaya	1,943	1.00	56	421,981	21.95	1,230	427,827	1.93	216	3,920,595	8.22	691	4.65	1.04	146	3.85	431
INDONESIA		193,915	100.00	5,603	1,922,570	100.00	5,603	22,183,000	100.00	11,207	47,710,521	100.00	8,405	446	100.00	14,008	100	11,218

Ket : 1 : Berdasarkan SUPAS 1995

2 : Berdasarkan Statistik Indonesia tahun 1999

3 : Berdasarkan Statistik Indonesia tahun 1996

4 : Berdasarkan Statistik Indonesia tahun 1999

5 : Berdasarkan Statistik Indonesia tahun 1996

a : Asumsi penerimaan dalam negeri sesuai RAPBN 2001 sebesar Rp242.996,7 miliar

DAU ditetapkan setelah dikurangi dengan bagi hasil sebesar Rp56.033,5 miliar

Lampiran 5

SIMULASI DANA ALOKASI UMUM DI PROPINSI SULAWESI TENGGARA^a

Karakteristik Daerah II

No.	Propinsi	Penduduk ¹			Luas Wilayah ²			Penduduk Miskin ³			PDRB non Migas a.d harga konstan ⁴			PAD/APBD ⁵			Pemerataan	
		Jumlah	%	Alokasi	Luas	%	Alokasi	Jumlah	%	Alokasi	Jumlah	%	Alokasi	Rasio	%	Alokasi	%	Alokasi
1	DI Aceh	3,847	1.98	278	55,390	2.88	161	425,598	1.92	215	1,520,394	3.19	179	11.58	2.60	291	3.85	324
2	Sumatera Utara	11,115	5.73	803	71,680	3.73	209	1,234,194	5.56	624	1,881,831	3.94	221	21.17	4.75	532	3.85	324
3	Sumatera Barat	4,323	2.23	312	42,898	2.23	125	384,582	1.73	194	1,664,561	3.49	195	17.30	3.88	435	3.85	324
4	Riau	3,900	2.01	282	94,561	4.92	276	322,018	1.45	163	2,021,680	4.24	237	18.75	4.21	471	3.85	324
5	Jambi	2,370	1.22	171	53,436	2.78	156	222,842	1.00	113	1,144,240	2.40	134	12.19	2.73	306	3.85	324
6	Sumatera Selatan	7,208	3.72	521	109,254	5.68	318	794,870	3.58	402	1,466,602	3.07	172	14.92	3.35	375	3.85	324
7	Bengkulu	1,409	0.73	102	19,789	1.03	58	137,239	0.62	69	1,078,502	2.26	127	11.95	2.68	300	3.85	324
8	Lampung	6,658	3.43	481	35,385	1.84	103	724,856	3.27	366	958,465	2.01	113	15.11	3.39	380	3.85	324
9	DKI Jakarta	9,113	4.70	658	664	0.03	2	231,331	1.04	117	6,073,540	12.73	713	60.13	13.49	1,512	3.85	324
10	Jawa Barat	39,207	20.22	2,832	43,177	2.25	126	3,962,111	17.86	2,002	1,341,317	2.81	158	29.14	6.54	733	3.85	324
11	Jawa Tengah	29,653	15.29	2,142	32,549	1.69	95	4,157,299	18.74	2,100	1,159,628	2.43	136	22.03	4.94	554	3.85	324
12	DI Yogyakarta	2,917	1.50	211	3,186	0.17	9	303,768	1.37	153	1,561,275	3.27	183	23.99	5.38	603	3.85	324
13	Jawa Timur	33,844	17.45	2,445	47,923	2.49	140	4,046,529	18.24	2,044	1,562,299	3.27	183	27.30	6.12	686	3.85	324
14	Bali	2,896	1.49	209	5,633	0.29	16	125,600	0.57	63	2,420,573	5.07	284	37.33	8.37	938	3.85	324
15	Nusa Tenggara Barat	3,646	1.88	263	20,153	1.05	59	653,026	2.94	330	845,596	1.77	99	12.95	2.91	326	3.85	324
16	Nusa Tenggara Timur	3,577	1.84	258	47,349	2.46	138	748,974	3.38	378	718,260	1.51	84	9.65	2.16	243	3.85	324
17	Kalimantan Barat	3,636	1.88	263	146,807	7.64	428	820,490	3.70	415	1,785,743	3.74	210	10.69	2.40	269	3.85	324
18	Kalimantan Tengah	1,627	0.84	118	153,564	7.99	448	189,414	0.85	96	2,321,400	4.87	273	5.37	1.20	135	3.85	324
19	Kalimantan Selatan	2,893	1.49	209	36,535	1.90	106	424,279	1.91	214	1,903,203	3.99	224	14.18	3.18	356	3.85	324
20	Kalimantan Timur	2,314	1.19	167	210,985	10.97	615	224,561	1.01	113	4,508,068	9.45	529	15.25	3.42	383	3.85	324
21	Sulawesi Utara	2,649	1.37	191	27,488	1.43	80	617,131	2.78	312	1,332,033	2.79	156	11.82	2.65	297	3.85	324
22	Sulawesi Tengah	1,938	1.00	140	63,689	3.31	186	139,394	0.63	70	1,080,453	2.26	127	7.13	1.60	179	3.85	324
23	Sulawesi Selatan	7,558	3.90	546	62,483	3.25	182	284,648	1.28	144	1,180,528	2.47	139	16.47	3.69	414	3.85	324
24	Sulawesi Tenggara	1,587	0.82	115	38,140	1.98	111	163,372	0.74	83	917,090	1.92	108	7.47	1.68	188	3.85	324
25	Maluku	2,087	1.08	151	77,871	4.05	227	417,047	1.88	211	1,342,645	2.81	158	7.25	1.63	182	3.85	324
26	Irian Jaya	1,943	1.00	140	421,981	21.95	1,230	427,827	1.93	216	3,920,595	8.22	460	4.65	1.04	117	3.85	324
INDONESIA		193,915	100.00	14,008	1,922,570	100.00	5,603	22,183,000	100.00	11,207	47,710,521	100.00	5,603	446	100.00	14,008	100	8,413

Ket : 1 : Berdasarkan SUPAS 1995

2 : Berdasarkan Statistik Indonesia tahun 1999

3 : Berdasarkan Statistik Indonesia tahun 1996

4 : Berdasarkan Statistik Indonesia tahun 1999

5 : Berdasarkan Statistik Indonesia tahun 1996

a : Asumsi penerimaan dalam negeri sesuai RAPBN 2001 sebesar Rp242.996,7 miliar

DAU ditetapkan setelah dikurangi dengan bagi hasil sebesar Rp56.033,5 miliar

Lampiran 6

Tabel Penghitungan DAU Propinsi Sulawesi Tenggara (miliar Rp)
(Dr. Muhammad Sidiq, Msc.)

Variabel	Bobot Variabel			
	Nasional	Propinsi	DAU Pem. Propinsi	DAU Pem. Kab/Kota
Penduduk	11,207	92	9	83
Luas Wilayah	11,207	222	22	200
Penduduk Miskin	5,603	41	4	37
PDB - PDRB	8,405	162	16	145
PAD/APBD	8,405	141	14	127
Pemerataan	11,207	431	43	388
TOTAL	56,034	1,089	109	980

Lampiran 7

Tabel Penghitungan DAU Propinsi Sulawesi Tenggara (miliar Rp)
(Karakteristik Daerah I)

Variabel	Bobot Variabel			
	Nasional	Propinsi	DAU Pem. Propinsi	DAU Pem. Kab/Kota
Penduduk	5,603	46	5	41
Luas Wilayah	5,603	111	11	100
Penduduk Miskin	11,207	83	8	74
PDB - PDRB	8,405	162	16	145
PAD/APBD	14,008	235	23	211
Pemerataan	11,207	431	43	388
TOTAL	56,034	1,067	107	960

Lampiran 8

Tabel Penghitungan DAU Propinsi Sulawesi Tenggara (miliar Rp)
(Karakteristik Daerah II)

Variabel	Bobot Variabel			
	Nasional	Propinsi	DAU Pem. Propinsi	DAU Pem. Kab/Kota
Penduduk	5,603	115	5	41
Luas Wilayah	5,603	111	11	100
Penduduk Miskin	11,207	111	8	74
PDB - PDRB	8,405	108	16	145
PAD/APBD	14,008	188	23	211
Pemerataan	11,207	324	43	388
TOTAL	56,034	956	107	960

TABEL 9. Model Ekonomi masing-masing Daerah Otonom

KETERANGAN	M O D E L				
	Kota Kendari	Kab. Kendari	Kab. Kolaka	Kab. Muna	Kab. Buton
Pola Konsumsi	$C = 3.594,5 + 0,93 C(-2) + 0,99 MA(1)$	$C = 0,97 C(-2) + 0,005 Pddk(-1) + 0,99 MA(1)$	$C = 0,48 C(-2) + 0,009 Infl.Mksr(-2) + 0,0003 Y(-1) - 0,1 MA(1)$	$C = 0,097 Y(-1) + 0,87 C(-2) + 0,99 MA(1)$	$C = 0,86 C(-2) + 0,1 Y(-1) + 0,99 MA(1)$
R ²	0.976076	0.980801	0.952975	0.980282	0.977840
Adj.R ²	0.974367	0.979841	0.949358	0.979296	0.976733
DW-stat	1.899257	1.792298	1.972935	1.896487	1.902854
Akaike	17.190750	18.037420	6.638232	17.209870	18.015300
Schwarz	17.329520	18.160290	6.802065	17.332740	18.138180
Pola Penghimpunan Dana	$PD = 0,87 Y(-1) + 0,84 PD(-1) + 0,005 G + 0,09 MA(1)$	$PD = 0,03 Y + 0,78 PD(-1) + 0,42 MA(1)$	$PD = 0,28 Y(-2) + 0,39 PD(-2) + 493,1 Trend + 0,65 MA(1)$	$PD = 0,11 Y + 0,87 PD(-1) + 0,19 MA(1)$	$PD = 26.540,21 + 0,61 Y(-2) + 0,82 PD(-1) + 2.438,3 KtrBank(-2) + 0,66 MA(1)$
R ²	0.991539	0.992752	0.953266	0.988684	0.995173
Adj.R ²	0.990664	0.992370	0.949577	0.988104	0.994665
DW-stat	2.050702	2.066870	1.730533	1.909679	1.782116
Akaike	21.359760	13.942510	20.331500	17.209990	19.874400
Schwarz	21.541150	14.067890	20.496990	17.334110	20.079190
Pola Penyaluran Kredit	$Kredit = 0,99 Kredit(-1) + 0,525 MA(1)$	$Kredit = -7.522 + 0,57 Kredit(-1) + 821 KtrBank(-2) + 17,96 Pddk + 0,11 MA(1)$	$Kredit = 6.079,8 + 0,80 Kredit(-1) + 152,7 Trend + 0,49 MA(1)$	$Kredit = -66.668 + 0,72 Kredit(-1) + 295,66 Pddk(-1) - 0,1 Y(-1) + 0,42 MA(1)$	$Kredit = 17,5 Pddk(-4) + 0,83 Kredit(-2) + 0,99 MA(1)$
R ²	0.848155	0.902644	0.967818	0.967474	0.801291
Adj.R ²	0.843553	0.893145	0.965573	0.964222	0.791598
DW-stat	1.787600	1.790403	2.079070	1.781678	1.952188
Akaike	20.990290	14.527870	18.212410	15.756180	18.871150
Schwarz	21.079170	14.726630	18.369870	15.956920	18.992800

Tabel 10. Hasil Proyeksi Model Ekonomi Daerah Otonom

KETERANGAN	PROYEKSI PERTUMBUHAN TAHUN 2001				
	Kota Kendari	Kab. Kendari	Kab. Kolaka	Kab. Muna	Kab. Buton
Pola Konsumsi	8% s/d 12%	17% s/d 22%	-16% s/d -21%	17% s/d 22%	20% s/d 25%
PDRB Berlaku	40% s/d 45%	36% s/d 41%	6% s/d 11%	19% s/d 24%	25% s/d 30%
Posisi Penghimpunan Dana	105% s/d 110%	43% s/d 47%	16% s/d 21%	21% s/d 26%	34% s/d 39%
Posisi Penyaluran Kredit	-1% s/d -6%	-20% s/d -25%	-2% s/d 3%	-1% s/d -6%	8% s/d 13%